



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1 A PADANG (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A
PADANG)**

SKRIPSI



**SHERLYA FEBRI M.D
06140263**

**JURUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3144/ PKIV/ 08/ 2010

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK
MAMPU DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

oleh:

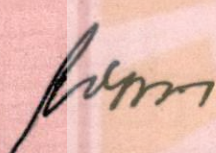
SHERLYA FEBRI M.D


06140263

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2010
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan

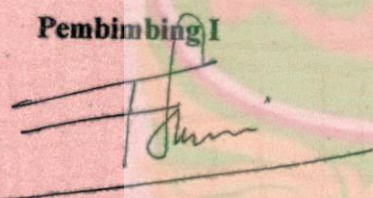
Pembantu Dekan I

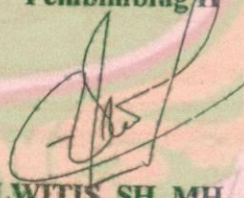

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H. M.H.
NIP. 196006251986031003


Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP/ 196212311989011002

Pembimbing I

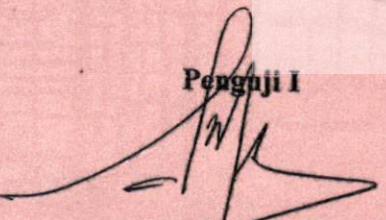
Pembimbing II



FADILLAH SABRI, SH. MH
NIP.195901111986031002


NELWITIS, SH. MH
NIP. 195906111986032001

Penguji I

Penguji II


APRIWAL GUSTI, SH
NIP.19530418198031003


YUSRIDA, SH. MH
NIP.195910071986032001



Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang beriman
Diantaranya kamu dan orang-orang yang berilmu
(Q. S. Al-Mujadalah : 11)

Atas ridho-Mu ya Allah..

Hari ini telah kuraih sesuatu yang kudambakan

Becercah harapan....telah kucapei

namun semua ini bukanlah akhir dari segalanya

Jangan pernah merasa putus asa dengan suatu kegagalan

Jadikanlah kegagalan itu sebagai cambuk

awal dari keberhasilan yang tertunda

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati ini

Kupersembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang yang kucintai

Ayahanda (Alm. Syamsuwardi) dan ibunda (Fulrahni)

Yang telah memberikan kasih sayang tiada tara

Yang telah menunjukkan arti kejujuran dan tanggung jawab

Terima kasih atas pengorbanan, cucuran keringatmu, moril dan materil

Terimalah setetes bukti buah karya ananda

Ananda menyangkal apa yang sekarang telah ananda rasih tidak sebanding

Dengan segala pengorbanan ayah dan ibu berikan

kepada ananda selama ini

Jadikanlah buah karya ananda sebagai embun penyejuk diantara

Limpahan do'a, pengorbanan dan kasih sayangmu yang tiada pernah

Mengharapkan balasan

Terima kasihku ucapkan untuk mak Uwo, mamak dan saudara-saudaraku

(Rasca Ripan. F; Rizkhan Randa. F)

Atas do'a juga semangat dan motivasi yang diberikan

Untuk teristimewa dan tersayang

Mak Uwo (Fulmayeti, S.H.M.H, Mamak Zulfir, S.E. S.H)

Terimakasih ku...

Untuk teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2006

Khususnya teman-teman terdekatku

(Eli, Eri, Elsa, Resti, Suciana, dll)

Tak lupa teman-teman yang masih berjuang

Aku harap kesuksesan selalu bersama kita semua

Penulis

SHERLYA FEBRI M. D

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PADANG**

(Sherlya Febri MD, 06140263, Fakultas Hukum Unand, 44 hal)

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya bantuan hukum ini setidaknya prinsip praduga tak bersalah dapat diterapkan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan perkara pidana, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Bantuan hukum secara cuma telah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, 2) Apakah kendala yang ditemui oleh penasihat hukum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif kesimpulannya masih sedikit perkara pidana yang terdakwa didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, kekuatan dan keterbukaan hati, pikiran sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Daniel, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Ilhamdi Taufik, SH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Remrandt, SH, M.Pd, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Dr. Ismansyah, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Hj. Efren Nova, SH, MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.

6. Bapak Fadhilah Sabri, SH, MH, selaku Pembimbing I dan Ibu Nelwitis, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan serta kemudahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang tidak ternilai harganya.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
9. Sahabat di Fakultas Hukum Angkatan '06, Suciana, Resti M, Elsa Darnasila., Eli, Evi yang pernah memahami dan memotivasi penulis.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan '06, Suci, Resti F. Icut, Ani, Lius yang pernah mengenal penulis.
11. Rekan-rekan anggota KKN Taeh Baruah Jorong Kubu Gadang dan teman-teman yang berada di Taeh Baruah terutama kepada Bapak Wali Nagari Taeh Baruah yang sudah memberikan tempat buat berteduh untuk anak-anak KKN yang juga turut memberikan motivasi kepada penulis.

Kepada yang telah disebutkan namanya di atas, dan rekan-rekan yang tidak disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah SWT memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Padang, 16 Juni 2010

Penulis

Sherlya Febri M.D

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
F. Metode Penelitian	10
BAB. II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM	
A. Sejarah Bantuan Hukum	14
B. Pengertian Bantuan Hukum	20
C. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum di Indonesia	28
D. Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia	33
E. Yang Berhak dan Menerima Bantuan Hukum	35
BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang	38

B. Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi
Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA

Padang..... 42

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 44

B. Saran 44

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah negara hukum. Prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan jawaban atas asas persamaan dihadapan hukum, termasuk di dalamnya keberadaan jaminan atas perlindungan hak-hak dasar warga negara. Diantaranya hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk didengar dan membela diri dalam sidang-sidang pengadilan dan lain-lain tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan seperti agama, keturunan, ras, etnis, pandangan terhadap keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, gender. Maka akan mampu menciptakan keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Bantuan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak mereka lahir. Dan di Indonesia dijamin oleh konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam hidup bernegara. Jaminan mendapatkan bantuan hukum tercantum dalam UUD Negara RI tahun 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya.¹ Lebih lanjut Pasal 28 D menyatakan *bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*.² Dengan demikian dalam suatu sistem negara hukum (*rule of law*), kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ada pada negara.

Kewajiban membela orang miskin adalah bagian pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) dan hak setiap orang.³ Itu sebabnya pengakuan kesetaraan dalam hukum diatur dalam konstitusi. Artinya setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang bersifat diskriminatif kepada siapapun dan dalam hal apapun dengan tidak membedakan ras, suku, agama, gender serta strata ekonomi, termasuk persamaan mendapatkan bantuan hukum.

Keberadaan bantuan hukum, untuk masyarakat yang tidak mampu juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, penjahat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² *Ibid.*

³ Lembaga Bantuan hukum Jakarta, (2007), *Bantuan hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*. Jakarta; Sentralisme Production, hal. 27

Kemudian dalam ayat (2) dikatakan: *“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”*.

Dari pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah:

1. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun penjara atau lebih.
2. Bagi mereka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (tidak mampu atau kurang mampu) yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih).

Begitu juga halnya dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengamanatkan setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum, yang diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menyebutkan bahwa: “(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Tidak hanya dibatasi untuk perkara pidana saja tetapi juga meliputi perkara perdata, maupun tata usaha negara tidak hanya pada proses litigasi tetapi

juga meliputi proses non litigasi sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, yang menyatakan:

1. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan disetiap tingkat proses peradilan.
2. Bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum diluar pengadilan.

Sekilas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 ini tampak menguntungkan masyarakat kurang mampu atau tidak mampu. Namun ada kekhawatiran akan sulit terelalisasi karena banyak aturan-aturan yang akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan. Pasal 56 KUHAP dapat diartikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena tersangka atau terdakwa tidak mampu untuk membayar jasa seorang Advokat maka penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan wajib menyediakan Advokat atau bantuan hukum yang semua biayanya ditanggung oleh negara.

Bantuan hukum secara cuma-cuma tidak boleh dilihat dengan sebelah mata sebagai kewajiban pemerintah tetapi perlu dipahami bahwa hal tersebut merupakan kewajiban moral advokat secara tanggung jawab profesi.

Profesi advokat sebagai *officium nobilium* diharapkan mampu menegakan dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan, tetapi dalam prakteknya harapan tersebut sering tidak ditemui bahkan sangat jauh dari yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah keberatan dari advokat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran terhadap kasus atau perkara yang tidak mendatangkan untung financial. Keadaan semakin membuat kronis penegakan

hukum di Indonesia sehingga tidak jarang masyarakat marjinal yang datang untuk mendapatkan pendampingan hukum tidak menjadi prioritas penanganan oleh advokat tersebut.⁴

Tidak mudah untuk menghilangkan stigma buruk yang terlanjur melekat pada profesi advokat. Dalam prakteknya terjadi kesemrawutan konsep bantuan hukum, dimana adanya Kantor Advokat yang kemudian mengaku sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tetapi kenyataannya berpraktek secara komersil dengan meminta Honorarium yang jelas menyimpang dari tujuan dan konsep bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum semakin tersingkir. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), diharapkan dapat memberikan dorongan dalam peningkatan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang peran secara seimbang oleh advokat.

Menurut Ramli Hutabarat untuk melaksanakan bantuan hukum secara efektif diperlukan setidaknya dua syarat:

1. Tersedia dana yang cukup, dan
2. Tersedia Sarjana Hukum yang tampil.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk lebih memahami persoalan seputar pelaksanaan bantuan hukum dan kewajiban Advokat sesuai amanat Undang-undang Advokat serta peraturan pelaksanaannya maka penulis tertarik untuk

⁴ Adnan Buyung Nasution, disampaikan dalam Diskusi Interaktif Etika Profesi Penasehat Hukum (sebagaimana dikutip oleh Bantuan Hukum Padang)

⁵ Ramly Hutabarat, (1985), *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia. Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 12

membuat skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh penasihat hukum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh penasihat hukum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan sumbangan kepada penegak hukum dalam hal ini Advokat agar dapat menjadi pedoman dalam mengambil suatu kebijakan, terutama dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan proposal skripsi ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan pelaksanaan kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Penulis akan menguraikannya secara sistematis mulai dari Peraturan Undang-undang yang lebih tinggi, yaitu:

- a. Dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Memberikan jaminan atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah negara dengan tidak ada kecuali, dan lebih lanjut teruang dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan jaminan atas kesamaan kedudukan di dalam hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama

di hadapan hukum, kemudian yang dipertegas dan dirinci lagi dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan tidak mendapatkan dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dalam bantuan hukum ada teori yang mendasari yakni teori persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*). Teori ini tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ramly Hutabarat, mengenai konsep *Equality before the law*, yaitu:

*“Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Kesamaan dihadapan pemerintah berarti semua warga negara sama dalam perlakuan pemerintah, sama dalam peraturan pemerintah dan sama haknya untuk menduduki posisi pemerintah menurut prosedur yang berlaku”.*⁶

Hal ini dapat dikatakan bahwa konsep seutuhnya dari teori persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) yakni suatu kejujuran atau jujur, tidak memihak, adil, seimbang, atau bersinambungan karena merupakan hak yang mulia dari setiap orang atau warga negara di bawah konstitusi negara yang demokratis.

⁶ Ramly Hutabarat, (1985), *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia. Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 12

Persamaan dihadapan hukum diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan dihadapan hukum harus disamakan dengan persamaan perlakuan (*equa treatment*).⁷

Bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa tertentu sebagai perwujudan konsep negara hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana berat.

b. Pasal 56 KUHAP menyebutkan sebagai berikut

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”
- 2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.⁸

c. Bantuan hukum cuma-cuma menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat (1), menyebutkan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

⁷ Frans Hendra Winata, (2009), *Konsultan Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

⁸ M. Yahya Harahap, (2003), *Pembahasan dan Penerapan KUHAP; Penyidik dan Pemuntut*; Jakarta; SinaR Grafika, hal. 344.

- d. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 menyatakan “Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan”

2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul proposal ini untuk lebih jelas dan terarah penulisan proposal skripsi penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual, yaitu:

- a. Pelaksanaan artinya penerapan.⁹
- b. Bantuan hukum artinya menurut pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
- c. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, di periksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁰
- d. Tidak mampu adalah tidak mampu secara ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu membahas peraturan dan teori yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam praktek.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah;

⁹ S. Wojowasito, (1997), *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit CV. Pengarang, tidak ada, hal.

¹⁰ KUHAP

a) Data Sekunder, merupakan suatu cara yang penulis lakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh melakukan penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari;

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- c. Undang-undang No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Advokat.
- e. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal dan hasil penelitian serta pendapat para ahli hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

b) Data Primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang merupakan data pokok dan langsung berhubungan dengan penelitian.

Data ini diperoleh melalui hasil Pengadilan Negeri pada responden lainnya seperti Advokat-advokat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan menggunakan daftar pernyataan sebagai pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul atau permasalahan yang diteliti.

Sifat wawancara adalah bersifat semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, tetapi masih dibuka kemungkinan pertanyaan tersebut untuk dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
2. Para Advokat dari LBH Padang 2 orang.
3. Para Advokat dari Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Padang 2 orang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang ada, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

4. Pengolahan dan Analisis Data

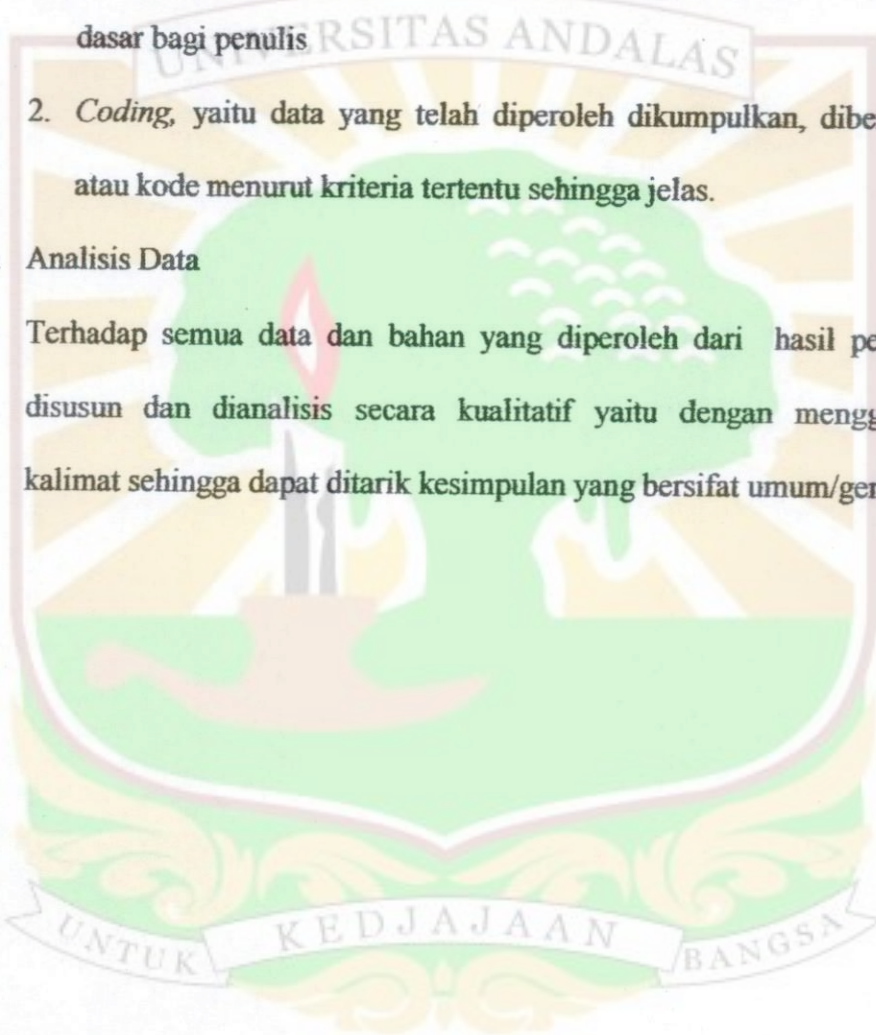
a. Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka terhadap data tersebut dilakukan pengolahan yaitu dengan cara:

1. *Editing*, dilakukan dengan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dengan melakukan pengecekan terhadap data tersebut, sehingga proses ini diharapkan data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar bagi penulis
2. *Coding*, yaitu data yang telah diperoleh dikumpulkan, diberi tanda atau kode menurut kriteria tertentu sehingga jelas.

b. Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggunakan kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum/general.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum sudah dilaksanakannya pada masyarakat Romawi. Pelaksanaan bantuan hukum pada waktu itu berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah melusunya revolusi Prancis bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan hukum yuridik, dengan mulai menekankan pada hak yang sama bagi masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan. Dan hingga awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum lebih banyak dianggap sebagai pekerjaannya memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.

Di Indonesia bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu hal relatif baru dikenal jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Bantuan hukum sebagai *Legal Intuition* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, karena dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.¹¹

Sejarah bantuan hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari sejarah Advokat di Indonesia karena bantuan hukum merupakan bagian yang integral dari profesi Advokat. Karena bantuan hukum di Indonesia mulai dikenal pada zaman Hindia Belanda maka konsep bantuan hukum yang ada di Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep Eropa walaupun dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh model

¹¹ Bambang Sunggono, (1994), *Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Bandung: Mandar, hal. 16.

bantuan hukum Australia dan Amerika Serikat. Profesi Advokat khususnya bagi golongan bumiputra baru dimulai pada tahun 1910 ketika banyak lulusan dari Universitas Leiden, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, memilih Profesi Advokat.

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum secara Formal di Indonesia sudah sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula sejak tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman raja tanggal 16 Mei 1884 Nomor 1, Perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga berlakukan di Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke organisatie en het beleid der justitie*) atau lazim disingkat RO. Mengingat baru dalam peraturan itulah diatur pertama kalinya "Lembaga Advokat", maka dapat diperkirakan bantuan hukum dalam arti yang formal baru di Indonesia pada tahun-tahun tersebut, dan hal itupun terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justice*. Pasal penting dari R.O yang menyangkut bantuan hukum adalah sebagai berikut:

"Advokat dan pengacara praktik yang ditunjuk wilayah yang menjadi yuridiksi pengadilan mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari *fee* yang berlaku untuk membantu mereka yang tidak memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma dibenani pembayaran yang lebih rendah dari pada *fee* normal berpekerja di pengadilan."¹²

Penggolong penduduk Hindia Belanda oleh pemerintah Kolonial Belanda membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia,

¹² Frans Hendra Winata, *Op.Cit*, hal. 29

khususnya dalam bidang bantuan hukum dan profesi Advokat. Salah satunya terlihat dari pemisahan sistem peradilan. *Pertama*, hirarki peradilan untuk orang-orang Eropa atau yang dipersamakan (*Residentie Gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Rechtshof*) dimana bagi mereka berlakunya *Reglement op den Rechtsvordering* (Sv) untuk acara pidana. *Kedua*, hirarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan (*Districtgerecht Regentschaps gerecht, dan Landraad*) dimana bagi mereka yang berlaku *Het Herzien Indonesische Reglement* (HIR) baik untuk acara perdata maupun untuk acara pidananya yang cakupannya sangat terbatas.

Secara resmi, jasa hukum untuk orang mampu dan fakir miskin disediakan HIR, khususnya dalam Pasal 237 sampai Pasal 254. Pasal-pasal tersebut memungkinkan penyelesaian pengadilan tanpa biaya. Sebelum kemerdekaan Pasal 250 HIR hanya berlaku kepada golongan orang pribumi, khususnya mereka yang dituntut hukum pidana dan bisa dihukum mati pada *Landraad* atau pengadilan khusus untuk orang-orang pribumi. Sementara dalam perkara-perkara perdata, golongan pribumi, Timur asing, dan Eropa diberi hak yang sama untuk memperoleh *bono publico di Raad van Justitie* atau pengadilan khusus di Eropa. Akan tetapi pasal bantuan hukum dalam HIR ini (Pasal 250 ayat (5) dan (6)) dalam praktiknya hanya mengutamakan bangsa Belanda, disamping membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Maka penjajahan bangsa Jepang tidak menampakkan kemajuan dari kondisi diatas. Perubahan-perubahan yang dilakukan sekedar mengganti 'warna' Belanda dengan 'warna' Jepang, sembari disisi lain menghilangkan hak-hak istimewa orang Belanda dan Eropa lainnya. Berdasarkan Undang-undang Balatentara Jepang Nomor

1 Tahun 1942, seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan militer Jepang tetap berlaku.¹³

Kondisi gerakan bantuan hukum sejak kemerdekaan Indonesia menurut Adnan Buyung Nasution adalah segera setelah memperoleh pengakuan kedaulatan secara *de jure* pada tahun 1950 sampai tahun 1950 sampai tahun 1959 (pada waktu Soekarno mengambil alih kekuasaan dengan menyatakan kembali kepada UUD 1945) keadaan pada waktu itu tidak berubah banyak. Diakui bahwa pluralisme dari badan peradilan telah dihapuskan, sehingga hanya terdapat satu sistem hukum untuk semua penduduk yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pada saat yang sama terdapat suatu hukum acara untuk seluruh penduduk. Patut disesalkan sistem *Raad van justitie* yang benar tidak dipilih tetapi malahan memilih sistem *Landraad*. Hukum acara bukanlah *Reglement op de Rechtsovrdering* (Rv) tetapi H.I.R (*Herziene Indonesche Reglement*).¹⁴

Keputusan tersebut membawa konsekwensi bahwa hukum yang menjamin hak individu dari golongan Eropa tidak tercermin dalam hukum yang berlaku setelah kemerdekaan, sistem hukum dan hukum yang berlaku sejak 1950 hanya berlaku bagi golongan pribumi (bumi putra) yang tidak meliputi bantuan hukum. Ini merupakan suatu kesalahan yang dibuat dalam sejarah kebijakan hukum di Indonesia.

Pada masa kekuasaan dan pengaruh Soekarno periode 1959-1965 bantuan hukum dan profesi hukum (Advokat) di Indonesia mengalami kemerosotan bersama dengan lumpuhnya sendi-sendi negara hukum. Pengadilan yang tidak bebas dan sarat dengan intervensi cabang kekuasaan eksekutif. Hakim merupakan kepanjangan

¹³ YLBHI, (2009), *Panduan Hukum di Indonesia. Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 5.

¹⁴ Frans Hendra Winata, *Op.cit*, hal. 39..

tangan pemerintah, karena adanya tekanan yang dimanifestasikan melalui konsultasi dengan jaksa dan alam membuat putusan pengadilan. Akibatnya tidak ada kebebasan dan impasilitas, pihak-pihak dalam suatu kasus tidak melihat efektivitas bantuan hukum atau manfaat profesi hukum (Advokat). Mereka lebih memilih jaksa, Hakim atau orang yang berkuasa dengan dalam masyarakat. Akibatnya banyak Advokat yang meninggalkan profesinya pada waktu itu.

Barulah pada masa orde baru masalah hukum tumbuh dan berkembang pesat. Suatu contoh yang dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.¹⁵

Program bantuan hukum di Indonesia sudah dirilis sejak PELITA III, IV, dan V, yang kemudian pelaksanaannya lebih ditingkatkan pada PELITA VI sebagai arah kebijaksanaan umum dari Pembangunan Nasional di bidang hukum. Dan menggariskan bahwa perlunya peningkatan sarana dan prasarana hukum sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap. Dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum maka penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, yang selama ini hanya Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s/d 1993/1994 maka dalam tahun 1994/1995 seterusnya dirintis juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) disamping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu:

¹⁵ Bambang Sungono, *Op.Cit*, hal. 16

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum¹⁶

Pada masa sebelumnya usaha pemberian bantuan hukum sangat terbatas pada bantuan hukum yang diperuntuk bagi golongan Tionghoa. Misalnya seperti yang dilakukan organisasi sosial Tjada Naya yang berdiri pada tahun 1950-an di Jakarta. Begitu juga bagi Biro Konsultasi dari Fakultas Hukum negeri Indonesia, seperti Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung, Universitas Air Langga di Surabaya dan lain-lain telah didirikan. Biro-biro ini hanya memberi konsultasi hukum simiskin, dan tujuan utamanya adalah pada dasarnya untuk menjadikannya sebagai tempat latihan bagi mahasiswa untuk mendapatkan keahlian yang diperlukan di masyarakat setelah penyelesaian studinya. Bantuan hukum universitas mula-mula hanya merupakan konsultasi hukum belaka. Kemudian di kembangkan pada tahun 1969 oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Bandung, menjadi semacam klinik sekolah hukum, yang kemudian diikuti oleh universitas lainnya. Dengan demikian mereka melakukan pelayanannya tidak sekedar memberikan nasihat hukum melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum di pengadilan.¹⁷

Jadi dapat dikatakan program bantuan hukum yang melembaga dan ruang lingkup yang luas baru dimulai dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBHI) di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970. keberadaan bantuan hukum kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 tahun 1970

¹⁶ *Data Informasi Bantuan Hukum Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI Direktur Jendral Badan Peradilan Tata Usaha Negara, 1994, hal. 13

¹⁷ Bambang Sungono, *Op.Cit*, hal. 16

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai Pasal 37. meskipun dalam undang-undang ini hanya memuat hal-hal pokoknya saja, namun mengatur secara tegas adanya suatu jaminan bagi seseorang untuk memperoleh bantuan hukum. Demikian juga halnya dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak kepada tersangka dan atau terdakwa tertentu untuk diberikan bantuan hukum.

Kemajuan yang sangat signifikan terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma terjadi dengan disahkannya Undang-undang Advokat berikut peraturan pelaksanaannya pada tahun 2008 yang menjadi Advokat secara Individu, Organisasi Advokat serta Lembaga Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum.

B. Pengertian dan Pengaturan Bantuan Hukum di Indonesia

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum pada mulanya berawal dari sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elite gereja terhadap para pengikutnya. Hubungan kedermawanan ini juga ada pada pemuka adat dengan penduduk sekitarnya. Pengertian bantuan hukum saat itu belum begitu jelas, dimana bantuan hukum disini diartikan sebagai bantuan dalam segala hal seperti dalam hal ekonomi, sosial, agama dan adat, sehingga macam bantuan diberikan.¹⁸

Bantuan hukum tidak ditafsirkan sebagai hak, tetapi sebagai bantuan, dalam arti melihat segala permasalahan hukum semata dari sudut hukum yang berlaku, bukan pada nilai perkara inti masalah. Bisa saja terjadi suatu perkara yang sangat tidak adil tetapi diberikan bantuan hukum karena sifat bantuan hukum yang

¹⁸ Bambang Sungono, *Op.Cit*, hal. 16

individual. Lingkup kegiatan pada pelayanan hukum jadi terbatas didalam maupun di luar pengadilan.

Secara perlahan konsep bantuan hukum berkembang menjadi suatu hak dimana setiap warga negara yang tersangkut perkara yang merasa terampas haknya boleh mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum sudah mulai di hubungkan dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial. Selanjutnya bantuan hukum mulai dikaitkan dengan kesejahteraan sosial (*welfare*) dan kesejahteraan politik (*democracy*). Dengan begitu lingkup kegiatan bantuan hukum menjadi luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum didalam dan diluar pengadilan. Namun demikian apabila kita membicarakan tentang pengertian bantuan hukum, hal yang paling utama yang mendasari pengertian itu ialah diberikan kepada siapakah bantuan hukum itu.

Ada dua istilah yang berbeda mengenai pengertian tersebut "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlihat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, pemberian bantuan hukum oleh para advokat meminta imbalan jasa.

Profesor Seton Pollock memasukkan kedalam pengertian bantuan hukum ini bentuk-bentuk pelayanan hukum (*Legal Services*) yang dikaitkannya sebagai pelayanan hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantas kemiskinan sebagai tujuan pokoknya.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hal. 58

Beberapa pengertian diberikan oleh para ahli untuk memperoleh gambaran umum tentang bantuan hukum dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Santoso Poedjosoebroto

Dengan mengutip pendapat dari K. Smith dan D. J Keeman, Santoso Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau *Legal Aid* diartikan sebagai berikut:

“Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara”.²⁰

2. Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan pengertian sebagai berikut:

(Jaksa Agung RI 1976) “yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan”.²¹

3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

“Pemberian bantuan hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan Pidana dan Perdata untuk akhirnya tampil di depan pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Pemerintahan, Hukum Internasional dan lain-lainnya yang memungkinkan memberikan bantuan

²⁰ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 21

²¹ *Ibid*

hukum di luar pengadilan misalnya: memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP); bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman; bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam urusan internasional di Departemen Luar Negeri; bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya”.²²

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian bantuan hukum secara luas yaitu: Memberikan pelayanan bantuan yang berhubungan dengan hukum kepada masyarakat termasuk mengadakan pembaharuan hukum disegala bidang. Sedangkan pengertian bantuan hukum secara sempit yaitu: Pembelaan dari seseorang yang berpekara di muka pengadilan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu.

Pengertian yang diberikan oleh kalangan pendidikan tinggi hukum biasanya dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang hukum dan kemanusiaan. Didalam seminar mengenai Arti dan Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum oleh suatu Fakultas Hukum Negeri pada tahun 1976 (diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia), bantuan hukum dikaitkan dengan Dharma ketiga Perguruan Tinggi yaitu: Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan jalan:

- a. Memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum.

²² *Ibid*, hal. 22

- b. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya pencarian hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum.
- c. Memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada masyarakat, khususnya kepada pencari hukum.²³

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa partisipasi aktif dari kalangan ilmiah diharapkan dapat berperan dalam skala yang lebih luas, yakni di satu mengisi strategi pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan, di lain pihak mengefektifkan bekerjanya pranata-pranata hukum untuk kepentingan-kepentingan terutama golongan-golongan masyarakat yang masih terkungkung oleh kondisi ketidakadilan sosial. Dengan demikian kalangan ilmuwan dan mahasiswa dapat mengembangkan prestasinya dan berpartisipasi secara positif dalam pembangunan.

b. Pengaturan Bantuan Hukum

Pengaturan mengenai bantuan hukum di Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, namun sebagian besar perundang-undangan tersebut hanya mengatur bantuan hukum pengendalian konflik.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1950 mengenai pengawasan tertinggi terhadap notaris dan pengacara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang digantikan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1965 yang juga mengatur tentang pengawasan tertinggi, hanya saja terdapat perbedaan yakni bahwa pengawasan tertinggi oleh Mahkamah Agung dilakukan terhadap Notaris dan Penasehat Hukum. Undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun

²³ *Ibid*

1965 tentang Mahkamah Agung. Tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Secara rinci pengaturan bantuan hukum dapat diklarifikasikan menjadi:

1. Perundang-undangan sebelum tahun 1945

1. *Reglement op de rechtelijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesia* (Stb. 1848 No. 57) atau bisa dikenal R.O yang mengatur perihal dasar-dasar peradilan, susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan di Hindia Belanda.²⁴
2. *Bepalingen Betreffende Het Kostuum der Regterlijke en datder Advocaten, Procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 No. 8 jo. Stb. 1849 No. 46) yang pada dasarnya berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pakaian seragam yang harus dipakai oleh para pejabat pengadilan, Advokat, Procureur, dan juru sita.²⁵
3. *Vegetegenwoordiging van den Lande in Rechten* (Stb. 1922 No. 522) yang mengatur perihal bantuan hukum pengadilan konflik tidak untuk golongan miskin.²⁶
4. *Regeling van de bijstand en de Vertegenwoordiging van Pertijen in de Birgerlijke Zaken voor Landraden* (Stb. 1972 No. 496), merupakan penerapan dari ketentuan khusus mengenai Advokat dan procureur yang dikenal dalam hukum barat.²⁷

²⁴ Soejono Soekanto, (1983), *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 72.

²⁵ *Ibid*, hal. 76

²⁶ *Ibid*, hal. 77

²⁷ *Ibid*, hal. 82

5. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Stb. 1941 No. 44) HIR tentang Hukum Acara Perdata.

2. H.I.R

Pasal 147 R. Bg./123 H.I.R

Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau diwakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali yang memberi kuasa tersebut hadir sendiri.

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Masalah bantuan hukum diatur dalam Bab VII tentang bantuan hukum Pasal 69 sampai Pasal 74 tetapi sebenarnya pengaturan mengenai bantuan hukum telah mulai diatur dari Pasal 54 dan seterusnya sampai Pasal 74. Bantuan hukum menurut konsep undang-undang ini terbatas pada perkara pidana tertentu dan terbatas pada ruang lingkup upaya litigas. Hal ini terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan.

4. Perundang-undangan setelah tahun 1945

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan status Advokat dan Pengacara serta mereka yang memberikan

bantuan hukum. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *Wetboot van strafrecht voor Naderlands Indie*.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1950 dan Undang-undang No. 3 Tahun 1965 yang di dalamnya mengatur tentang Pengawasan Tertinggi oleh Mahkamah Agung yang dilakukan terhadap Notaris dan Penasehat hukum/.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hanya mengatur pokok-pokoknya saja dan secara yuridis memberikan pengakuan terhadap eksistensi bantuan hukum yang terdapat dalam pasal 37 sampai pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang Tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat

Pasal 39

Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

5. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang ini secara implisit mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum untuk semua jenis perkara baik litigasi maupun non litigasi sebagaimana terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi:

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Advokat.

C. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum di Indonesia

Fungsi Lembaga Bantuan Hukum banyak sekali peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan menghambat perkembangan hukum. Berdasarkan pengalaman ini Lembaga Bantuan Hukum dapat memelopori usul-usul perubahan Undang-undang kearah pembaharuan hukum sesuai dengan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masa pembangunan ini. Dalam hal ini lembaga hukum dapat bekerja sama dengan fakultas-fakultas hukum dalam memikirkan usaha-usaha perubahan hukum.

Tujuan bantuan hukum haruslah mampu menjangkau para pencari keadilan yang tidak mampu dimanapun dan mendorong terciptanya keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat.

Mulya Lubis mengatakan:

“Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong kearah terciptanya perombakan tata sosial, sehingga kita akan memiliki pola hubungan yang lebih adil si lemah tidak berdaya menghadapi si kuat. Disini tempat bantuan hukum struktural yang harus berpihak kepada si lemah yang merupakan

mayoritas perjuangan hukum mau tidak mau harus diarahkan pada terciptanya hukum yang berpihak kepada si lemah”²⁸

Disini dapat melihat Lembaga Bantuan Hukum sebagai suatu lembaga tidak hanya melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan khususnya masyarakat lemah yang buta hukum di pengadilan tetapi juga harus mampu pula mendorong terciptanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat maksud didirikannya Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu.
2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum.
3. Memajukan hukum dan melaksanakan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan tersebut ingin dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap klien-nya di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur dan lainnya.
3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau badan-badan dan instansi pemerintah.

²⁸ Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES Jakarta 1986, hal. 85.

4. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi mahasiswa fakultas hukum.

Di dalam buku peringatan dua tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum dijelaskan mengenai peranan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum sebagai berikut:

1. *Public Service*

Ini sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi dimana karena sebagian dari masyarakat tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk membayar dan menggunakan jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma. Servis dari lembaga di sini dapat diibaratkan sebagai klinik atau rumah sakit bagi orang-orang sakit yang tidak mampu untuk pergi ke dokter.

2. *Social Education*

Ini sehubungan dengan kondisi *social cultural*, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti akan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum, sehingga dengan demikian sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Perbaikan Tertib Hukum

Sehubungan dengan sistem situasi politik, dimana peranan Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, tetapi juga

dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

4. Permbukaaan Lapangan Pekerjaan (*Labour Market*).

Dewasa ini banyak terdapat pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dibidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika dapat didirikan di seluruh Indonesia, maka banyak sekali dari tenaga-tenaga sarjana hukum yang dapat di tampung dan dimanfaatkan.

5. *Practical Training*

Fungsi yang juga diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentral-sentral ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dengan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat mengkaji teori-teori yang dipelajari kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman. Bagi lembaga kerja sama diharapkan akan membawa efek turut membantu menjadi idealisme lembaga, disamping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran, gagasan ilmiah maupun

sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan lembaga.²⁹

Melihat maksud dan peranan dari Lembaga Bantuan Hukum di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah peranan atau kehadiran biro atau Lembaga Bantuan Hukum di fakultas-fakultas hukum yang merupakan tempat latihan bagi para mahasiswa dan sebagai perwujudan pengabdian masyarakat.

Menurut Prof. Mr. Ny. A. Abbas Manoppo mengatakan: "Maksud dan tujuan didirikannya biro atau lembaga konsultasi bantuan hukum pada tiap fakultas hukum adalah:

1. Untuk melatih calon-calon sarjana hukum menghadapi persoalan hukum dalam praktek-praktek sehari-hari.
2. Untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang memerlukan bantuan hukum akan tetapi karena keadaan ekonominya mungkin sekali kehilangan hak kendatipun hukum menjamin haknya itu.³⁰

Kemudian Prof. Muchtar Kusumaatmaja menyebutkan bahwa dua tujuan yakni:

1. Memberikan latihan kepada mahasiswa dalam keterampilan hukum yang praktis, dan
2. Membantu orang-orang miskin dalam memperoleh penyelesaian masalah-masalahnya dengan cara hukum.³¹

²⁹ Soejono Soekanto, *loc cit.* hal. 123.

³⁰ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta 1993. hal. 17.

³¹ Abdul Hakim G. Nusantara, et all, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1980, hal. 11.

Dari pendapat tersebut dapat dirinci tujuan dan maksud didirikan biro atau lembaga konsultasi hukum pada tiap-tiap fakultas hukum adalah:

a. Tujuan Pendidikan

Yakni memberikan kesempatan kepada calon sarjana hukum untuk memperoleh latihan keterampilan guna menjalankan tugasnya sesuai dengan profesinya sebagai sarjana hukum setelah terjun dalam masyarakat atas penguasaan kenyataan atau keadaan hukum dari pada penguasaan teori atau prinsip hukum.

b. Tujuan Pengabdian

Diharapkan bahwa para sarjana hukum dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat luas sehingga akhirnya dapat mencapai pembaharuan dalam bidang hukum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Saat ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh fakultas-fakultas hukum mengalami kemunduran dalam prakteknya, dimana para mahasiswa kurang aktif bahkan jarang memanfaatkannya. Seharusnya para mahasiswa lebih aktif sebagai sarana praktek sehingga meningkatkan kepekaan terhadap tuntutan yang ada dalam masyarakat.

D. Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia

Salah satu tugas dari Lembaga Bantuan Hukum adalah membangun kesadaran hukum masyarakat agar menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai manusia yang terhormat yang menyadari harkat dan martabatnya sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Atas dasar tersebut maka disusunlah

beberapa program Lembaga Bantuan Hukum yang antara lain adalah pengembangan hak azasi manusia.

Hak azasi merupakan apa yang dimiliki warga negara secara lahiriah dan patut dilaksanakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Sanksi bisa dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan penyelidikan yang cermat sehingga diketahui bahwa yang salah harus di hukum dan yang benar harus dilindungi, bukan sebaliknya. Hak-hak dasar warga negara itu bukan saja dilindungi oleh negara secara terbatas, tetapi dunia internasional juga melindungi hak-hak dasar individu. Hak-hak dasar individu itu yang dalam konstitusi dilindungi, antara lain adalah hak hukum agar tidak diberlakukan sewenang-wenang, merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah.

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak azasi manusia bagi rakyat miskin. Tujuan bantuan hukum diperluas tidak saja terbatas pada bantuan hukum individuall tetapi juga struktural, bantuan hukum harus diartikan sebagai upaya membebaskan rakyat miskin dari struktur yang menindas mereka, karena itu gerakan bantuan hukum harus mampu membuka mata dan perasaan masyarakat miskin agar berani memperjuangkan hak azasinya, sehingga menjadikan bantuan hukum itu pada dasarnya berarti program pendidikan masyarakat untuk membangun dan meningkatkan pengertian dan kesadaran diantara rakyat Indonesia bahwa setiap orang mempunyai hak yang dijamin hukum.³²

Rakyat terutama masyarakat miskin harus dididik dan diberikan kesadaran bahwa walaupun mereka miskin dan lemah, mereka adalah juga manusia dengan harga diri dan merupakan warga negara dengan hak-hak yang diatur menurut hukum yang sama dengan yang kuat (kaya). Jika hak-hak tersebut dilanggar, mereka juga

³² Abdul Hakim G. Nusantara, *Op Cit.* hal. 13.

berhak membela diri dan memperjuangkan hak-hak tersebut melalui jalur hukum. Jadi bantuan hukum adalah juga merupakan hak dari setiap warga negara dengan tidak memandang harta, pangkat dan kedudukannya.

Adnan Buyung Nasution, SH dalam Konferensi ke-8 "*Word Peace Through Law Centre*" pada tahun 1977 di Manila mengatakan:

"Si miskin bahkan tidak menyadari dan tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum, jangankan lagi untuk tahu bagaimana mencari upaya hukum bahkan mereka yang tahu pun, umumnya tidak mempunyai keberanian moral untuk mempergunakannya. Hal ini disebabkan karena sikap mental dan nilai-nilai masyarakat. Peodalisme dan sistem politik yang otoriter begitu kuat berakar, sehingga rakyat takut berhubungan dengan hukum atau dengan yang berwenang".

"Dalam suatu masyarakat dimana rakyatnya mempunyai sikap demikian, nyatalah bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan dan memberitahukan kepada mereka akan kenyataan bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum. Bersamaan dengan itu memberitahu rakyat bahwa bantuan hukum sebagai suatu lembaga itu ada, yang dapat mereka pakai untuk membela dan menuntut hak-haknya".³³

E. Yang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Setiap orang berhak menggunakan kesempatan memperoleh perlindungan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 56 KUHAP. Pemberian bantuan hukum untuk orang yang tersangkut

³³ Adnan Buyung Nasution, *Op Cit.* hal. 55.

perkara di pengadilan, khususnya perkara pidana sangatlah penting dimana tersangka atau terdakwa berhadapan dengan negara, dalam hal ini diwakili oleh polisi, jaksa dan hakim. Dengan didampinginya terdakwa oleh seorang atau lebih penasihat hukum akan memperlancar jalannya pemeriksaan di pengadilan.

Bagi mereka yang tidak mampu ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuan secara cuma-cuma.

Bagi terdakwa yang tidak mampu diberikan kebebasan kepadanya untuk mencari pembela menurut kemauannya. Dalam hal ini Pasal 55 KUHAP menyebutkan:

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas setiap tersangka atau terdakwa mulai dari tingkat penyelidikan, penuntutan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berhak memperoleh bantuan hukum atau kewajiban bagi penegak hukum untuk menghadirkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau

terdakwa yang tidak mampu, atau lebih dikenal dengan bantuan hukum secara *prodeo*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

1. Orang-orang yang Berhak Diberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Setiap orang berhak dan berkesempatan memperoleh perlindungan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 56 KUHAP. Pemberian bantuan hukum untuk orang yang tersangkut perkara di pengadilan, khususnya perkara pidana, sangatlah penting dimana tersangka atau terdakwa berhadapan dengan negara, dalam hal ini diwakili oleh polisi, jaksa dan hakim. Dengan didampinginya terdakwa oleh seorang atau lebih penasehat hukum akan memperlancar jalannya pemeriksaan di pengadilan.

Dalam perkara pidana sering kita jumpai dimana pihak kepolisian secara sewenang-wenang, tanpa suatu alasan yang sah menangkap simiskin dan menahannya sampai berminggu-minggu. Peristiwa ini terjadi sebagai akibat ketidaktahuan dan ketidakberdayaan simiskin dalam menghadapi pihak kepolisian. Maka menangani hal tersebut kita harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku dimana menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut untuk melindungi hak-hak simiskin dan berusaha agar proses penerapan hukum dapat dilakukan dengan tepat yang tidak bersifat menindas. Bagi mereka yang tidak mampu ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Penjahat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bagi terdakwa yang mampu diberikan kebebasan kepadanya untuk mencari pembela menurut kemauannya. Dalam hal ini Pasal 55 KUHP menyebutkan:

“Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

2. Prosedur Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Memberikan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang bagi masyarakat yang tidak mampu diserahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum maupun badan-badan bantuan hukum baik yang negeri maupun swasta maupun kepada pengacara (advokat) yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ini dilakukan atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu kesempatan yang sama dalam usaha untuk mencapai pemerataan di bidang hukum. Untuk itu bagi terdakwa yang tidak mampu dapat ditunjuk seorang pembela yang dibiayai oleh negara dengan syarat terdakwa harus menunjukkan surat

keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, antara lain:

1. Kepala Lurah
2. Camat
3. Kepolisian
4. Kejaksaan Tinggi
5. Kantor Sosial

Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang surat keterangan miskin tersebut dikeluarkan oleh Kepala Lurah. Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi golongan masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang secara lebih jelas dapat dilihat antara lain:

1. Mengajukan permohonan untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum, yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Terdakwa menyertakan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah (pejabat lain yang berwenang).
3. Kemudian Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan membuat surat penunjukan seorang atau lebih penasehat hukum setelah berkonsultasi Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
4. Surat kuasa dari terdakwa kepada penasehat hukum untuk membela kepentingan di persidangan.

Pemberian bantuan hukum yang ditunjuk harus yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan mempunyai nama baik. Sanggup memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sehingga mampu memperjuangkan

kepentingan si miskin (masyarakat kurang mampu) sebagai subyek hukum. Sedangkan ukuran ketidakmampuan tersebut disini ditentukan dengan adanya surat keterangan yang menyatakan tidak mampu atau miskin dari kepala lurah.

Dari data yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan. Walaupun masih ada masyarakat yang tersangkut perkara seharusnya mendapatkan bantuan hukum, menolak untuk didampingi penasehat hukum yang ditawarkan kepadanya, hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum yang sama kedudukannya tanpa membedakan pangkat, golongan, kekayaan dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat penulis gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

**Data jumlah perkara yang masuk dan yang tidak diputuskan
(data dari tahun 2004/2008)**

Jenis Perkara	Biasa			Singkat		Ringan	
	Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Masuk	Putus
2004	49	41	8	4	4	965	965
2005	44	49	3	2	1	1361	1361
2006	46	38	11	4	4	556	556
2007	25	30	6	1	1	515	515
2008	29	29	6	-	-	405	405

Sumber data: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkara yang masuk umumnya adalah perkara ringan atau lalu lintas sehingga tidak memerlukan bantuan hukum

sedangkan dari perkara biasa yang masuk dapat dilihat perkara-perkara yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dalam tabel berikut:

Tabel 2

Perkara yang mendapat bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Tahun	No. Perkara	Pasal yang dilanggar
2005	05/Pid.B/2005/PN.Pdg	Pasal 360 (2) KUHP
2006	463/Pid.B/2006/PN.Pdg	Pasal 170 KUHP
	462/Pid.B/2006/PN.Pdg	Pasal 360 KUHP
	02/Pid.B/2006/PN.Pdg	Pasal 363 KUHP
	473/Pid.B/2006/PN.Pdg	Pasal 242 KUHP
2007	45/Pid.B/2007/PN.Pdg	Pasal 362 KUHP
	231/Pid.B/2007/PN.Pdg	Pasal 339 jo. 486 KUHP
2008	361/Pid.B/2008/PN.Pdg	Pasal 363 KUHP
	362/Pid.B/2008/PN.Pdg	Pasal 362 KUHP

Sumber data: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 yang mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma hanya satu kasus dan pada tahun 2006 terdapat 4 kasus, disini terjadi kenaikan persentase sebesar 6%. Pada tahun 2006 terjadi penurunan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebanyak 6 kasus (4%), juga tahun 2007. hal ini disebabkan juga karena kasus-kasus pidana yang masuk tidak sebanyak tahun sebelumnya.

B. Kendala yang Ditemui dalam Proses Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Sama halnya dengan pengadilan-pengadilan negeri lain kendala umum yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah masalah dana yang terbatas disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Asmudin, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka diketahui bahwa dana yang disediakan untuk program bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah Rp. 1.000.000,- perkasus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman, setiap tiga bulan.

Menurut konferensi Law Asia III 1973 bahwa dana bagi suatu Lembaga Bantuan Hukum diperoleh dari:

1. Dana-dana umum
2. Perusahaan swasta
3. Praktisi
4. Yayasan Swasta

Sedangkan menurut anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum bahwa sumber dana diperoleh dari:

1. Hasil-hasil usaha Team Fund Raising
2. Bantuan yang sah dan tidak mengikat dari masyarakat
3. Bantuan dan sumbangan dari Lembaga Bantuan Hukum luar negeri

Prinsip dari organisasi bantuan hukum ini dalam menerima bantuan biaya dari pihak lain adalah bahwa dana yang diterima itu tidak disertai ikatan apapun dan pihak yang menerimanya mempunyai kebebasan dalam penggunaannya sepanjang yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.
2. Dana yang masih sangat terbatas yang disediakan oleh pemerintah dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu yang bermasalah dengan hukum tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma.

B. Saran

1. Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma ini tetap dipertahankan, sehingga adanya rasa keadilan dan persamaan di bidang hukum dalam hal ini dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Pemerintah kiranya perlu meningkatkan biaya untuk bantuan hukum secara cuma-cuma ini. Dan perlunya sosialisasi Pasal 56 KUHAP terhadap masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Haki G. Nusantara. 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Alumni, Bandung.
- Adnan Buyung Nasution, 1981; *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit LP3ES
- Aria Zunerti, 2003, *Modul Bantuan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Departemen Kehakiman RI, 1999, *Data Informasi Bantuan Hukum: Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Memperoleh Dana Bantuan Hukum Bagi Golongan masyarakat yang Kurang Mampu*. Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesi, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Azasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- _____, 2009, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Sentralisme Production, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peradi, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Penerbit.
- Prodjohamidjojo, Martinan, 1984, *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- PSHK, YLBHI, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 1985; *Persamaan di Hadapan Hukum (Equity Before the Law) di Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia.